

FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarak

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email : srioktaviani513@gmail.com, thoyibm12@gmail.com, mhusnimubarak@polsri.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima

13 Juli 2022

Direvisi

11 Agustus 2022

Disetujui

23 Agustus 2022

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah, belanja modal, belanja pegawai, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi. Populasi penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (www.bpk.go.id) dengan data runtut waktu (Time-Series) mulai dari tahun 2016 hingga 2020 (5 tahun) dan data silang (cross-section Data) sebanyak 17 Kabupaten/Kota, sehingga data panel atau sampel yang digunakan berjumlah 85 panel atau sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS For Windows Versi 26.00. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Pegawai merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of income, capital expenditures, personnel expenditures, and economic growth on the performance of local governments in districts/cities in South Sumatra Province. The factors used in this research are Regional Original Income, Capital Expenditures, Personnel Expenditures, Special Allocation Funds, and Economic Growth. The population of this research is 17 regencies/cities in South Sumatra Province. This research is a quantitative study that uses secondary data from the official website of the Supreme Audit Agency (www.bpk.go.id) with time series data from

Keywords:

Regional Government Financial Performance,

How to cite:

Wulandari, Sri Oktaviani, M. Thoyib, M. Husni Mubarak (2022). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Syntax Transformation*, 3 (8).

<https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.593>

E-ISSN:

2721-2769

Published by:

Ridwan Institute

Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

<p><i>Regional Original Income, Capital Expenditure, Personnel Expenditure, Special Allocation Funds, and Economic Growth</i></p>	<p><i>2016 to 2020 (5 years) and cross data (cross data). (section Data) as many as 17 regencies/cities, so that the panel data or samples used are 85 panels or samples. Data analysis techniques in this study are descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing with the help of SPSS For Windows Version 26.00 program. The results of data analysis show that simultaneously Regional Original Income, Capital Expenditures, Personnel Expenditures, Special Allocation Funds, and Economic Growth have a positive and significant impact on Regional Government Financial Performance. Partially Local Original Income, Capital Expenditure, Personnel Expenditure, Special Allocation Funds, and Economic Growth have a positive and significant impact on the Financial Performance of Local Governments. Personnel Expenditure is the most variabl.</i></p>
---	---

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, paradigma pengelolaan keuangan daerah telah berubah secara radikal. UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menjadi landasan utama penerapan sistem desentralisasi untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator terpenting untuk membentuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah mengelola keuangannya dengan baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah.

Menurut (Alhusain et al., 2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Kepala Kanwil DJPb Sumatera Selatan mengatakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kantong pemerintah daerah di Sumatera Selatan hanya sebesar 18,17 persen. Sementara rasio transfer dana dari pusat mencapai 81,83 persen. Hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang yang tercatat memiliki rasio PAD di atas rata-rata, yakni sebesar 40,36 persen dan 34 persen. Berikut perbandingan realisasi PAD Sumatera Selatan dari tahun 2016-2020

Tabel 1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	2.378.960.064.732
2017	2.835.440.186.799
2018	3.528.010.712.183
2019	3.494.510.853.251
2020	3.375.100.984.842

Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2022)

Dari tabel 1, dapat dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan belum stabil. Penurunan realisasi pada Pendapatan Asli Daerah disebabkan pandemi

COVID-19 selama tahun 2020 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat pada umumnya mengalami penurunan yang signifikan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan realisasi belanja modalnya dengan tujuan untuk meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja modal sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan masih tergolong rendah. Hingga September 2021, realisasi belanja modal sejumlah pemerintah daerah bahkan

masih ada yang dibawah 50 persen. Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen. Realisasi belanja modal Sumatera Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Data Realisasi Belanja Modal
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	607.740.926.745
2017	1.377.382.678,423
2018	1.537.275.105,768
2019	1.606.219.507.432
2020	1.564.700.767.363

Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2022)

Tabel 2 menjelaskan bahwa realisasi belanja modal Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan pada tahun 2020. Rendahnya serapan belanja tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah terutama pada tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain belanja modal, belanja pegawai juga merupakan segala bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kompensasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang dan komoditas

yang tersedia untuk pegawai negeri sipil. Belanja pegawai dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam melihat kemandirian suatu daerah (Suwarno, 2021). Di lansir dari (Zulkanedi, 2021) menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyorot anggaran belanja pegawai di Sumatera Selatan yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. Berikut ini data belanja pegawai Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

Tabel 3
Data Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	655.085.575.419
2017	1.458.701.975.762
2018	1.657.583.970.192
2019	1.757.169.664.436
2020	1.771.524.397.218

Sumber: www.bpk.go.id. (data diolah, 2022)

Melalui Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Hal ini membuktikan bahwa besarnya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdampak langsung terhadap APBD pada pengurangan

belanja modal yang sangat signifikan serta pengelolaan keuangan daerah yang masih belum efektif dan efisien.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi solusi atas kekurangan anggaran pemerintah daerah untuk perluasan infrastruktur (Putra & Ulupui, 2015). DAK adalah dana yang berasal

Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

dari pemerintah pusat, diberikan kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan daerah tetapi merupakan prioritas nasional (Huda & Sumiati, 2019). Dilansir dari (www.rmolsumsel.id/), penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Sumsel ke kas daerah hingga 30 September 2021 baru

mencapai Rp623,89 miliar atau sebesar 32,78 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,90 triliun. Rendahnya penyerapan DAK Fisik tersebut disebabkan lemahnya proses perencanaan yang dibuat pemerintah daerah. Berikut ini data Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

Tabel 4

Data Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	148.180.327.539
2017	855.483.708,566
2018	2.171.297.782,400
2019	2.259.489.236,940
2020	2.233.802.709.438

Sumber: www.bpk.go.id. (data diolah, 2022)

Pada Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan respons Pemda terhadap pengelolaan DAK terbilang kurang. Sebagian pemda tidak terlalu proaktif dalam mengelola DAK yang diterimanya.

Angka pertumbuhan ekonomi secara teoritis menggambarkan peningkatan secara nyata jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah yang kemudian dapat menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2020 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun 2019 (Nugroho, 2016). Adanya pandemi wabah COVID-19 menyebabkan perlambatan konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri, dan investasi yang disebabkan menurunnya aktivitas ekonomi untuk mengurangi tingkat penyebaran wabah COVID-19.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini akan menggunakan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Data PDRB Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan periode 2016 s/d 2020 yang dipublikasikan pada website resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI www.bpk.go.id.

Populasi dalam penelitian ini yaitu 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota dengan periode waktu 5 tahun dari tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh (sensus sampling) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Jumlah pengamatan pada penelitian ini adalah 85 sampel (17 Kabupaten/Kota x 5 tahun).

Teknik Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu teknik dokumentasi serta dari sumber lainnya, dimana peneliti akan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian yang ada, seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengumpulkan data mengenai anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai,

Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi

dan Pertumbuhan Ekonomi serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 sampel dengan periode waktu 5 (lima) tahun yakni 2016-2020. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26 (Purnomo, 2016).

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan data variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus,

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	85	2,79	31,94	8,4322	5,45762
Belanja Modal	85	14,12	51,94	28,0371	7,69332
Belanja Pegawai	85	13,67	57,43	37,7635	8,42378
Dana Alokasi Khusus	85	6,19	21,94	12,9794	3,37110
Pertumbuhan Ekonomi	85	-,25	8,65	3,7618	2,13666
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	85	66,48	121,93	92,4615	9,50560
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N	85	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,29963352
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,058
Test Statistic	,069	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}	
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian data yang digunakan berdistribusi normal. Diketahui nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-

tailed) sebesar 0,200, nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, artinya data yang diolah berdistribusi normal.

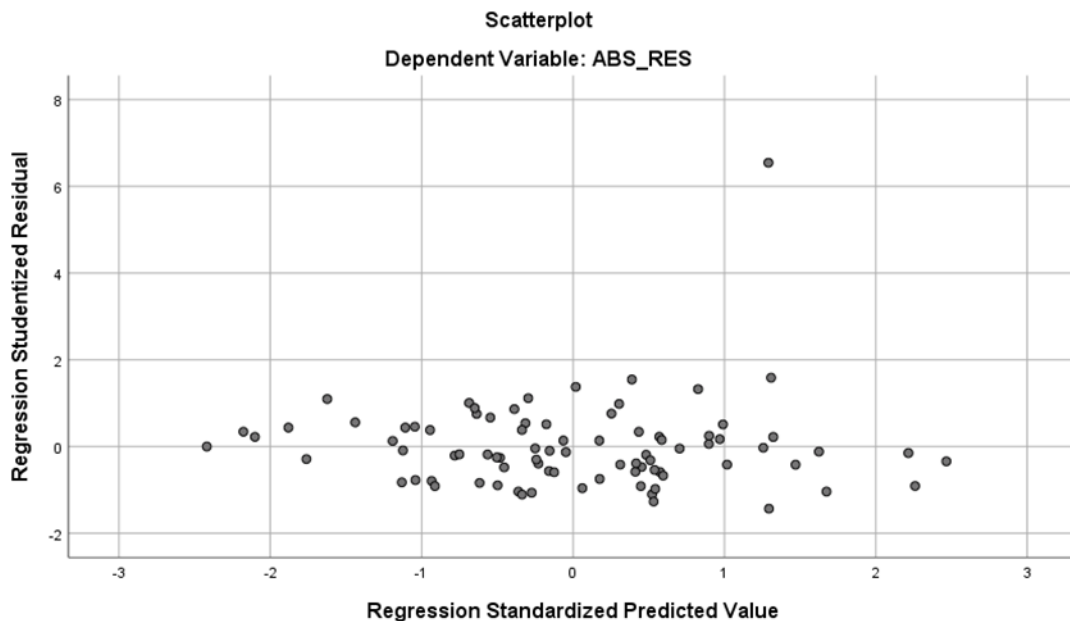
Tabel 7
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	,800	,459		1,743	,085		
Pendapatan Asli Daerah	1,003	,007	,576	149,793	,000	,851	1,175
Belanja Modal	1,013	,008	,820	128,387	,000	,309	3,239
Belanja Pegawai	1,009	,008	,894	132,042	,000	,274	3,644
Dana Alokasi Khusus	1,001	,011	,355	91,478	,000	,835	1,197
Pertumbuhan Ekonomi	,991	,017	,223	59,557	,000	,898	1,113

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 7 di atas diperoleh hasil bahwa kelima variabel independen memiliki nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas atau independen dalam model regresi.



Gambar 1

Grafik Plot Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022

Tabel 8
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	1,000 ^a	,999	,999	,30897	2,070	

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output data diolah dengan SPSS 26, 2022

Tabel 8 di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson untuk hipotesis sebesar 2,070. Oleh karena nilai DW lebih besar dari $4 - DU$ ($4 - 1,7736 = 2,2264$) dan kurang dari $4 - DL$ ($4 - 1,5254 = 2,4746$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi sudah terbebas dari autokorelasi karena nilai $DU < DW < 4-DU$ atau $1,7736 < 2,070 < 2,2264$.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh untuk t hitung sebesar 149,793 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($149,793 > 1,990$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka akan menyebabkan peningkatan nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Maulina et al., 2021), (Istiza et al., 2021) dan (van't

Hof et al., 2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh untuk t hitung sebesar 128,387 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($128,387 > 1,990$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti setiap peningkatan Belanja Modal maka akan berdampak pada peningkatan nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Lestari & Hapsari, 2020) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh untuk t

hitung sebesar 132,042 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($132,042 > 1,990$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti setiap penurunan Belanja Pegawai maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin baik.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2021) dengan penelitian yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh untuk t hitung sebesar 91,478 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($91,478 > 1,990$). dan nilai signifikansi lebih kecil dari dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti setiap peningkatan Dana Alokasi Khusus maka akan semakin efisien nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Machmud &

Radjak, 2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh untuk t hitung sebesar 59,557 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($59,557 > 1,990$). dan nilai signifikansi lebih kecil dari dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jadi dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan besarnya tingkat potensi daerah maka semakin baik pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati & Hamzah, 2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Uji F pada penelitian ini, maka diperoleh nilai F hitung sebesar $15885,607 > F$ tabel 2,330 dan juga diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ atau ($0,00 < 0,05$), sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja

Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

BIBLIOGRAFI

- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [Google Scholar](#)
- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka–Jawa Barat. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4). [Google Scholar](#)
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. [Google Scholar](#)
- Istiza, D., Feblin, A., & Yulitiawati, Y. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *JETAP*, 2(1), 47–61. [Google Scholar](#)
- Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2013-2018). *EProceedings of Management*, 7(2). [Google Scholar](#)
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*, 2(1), 17–32. [Google Scholar](#)
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399. [Google Scholar](#)
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 29(2). [Google Scholar](#)
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Prasetyo, R. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2020). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. [Google Scholar](#)

Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

- Purnomo, R. A. (2016). Analisis statistik ekonomi dan bisnis dengan SPSS. CV. Wade Group bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press. [Google Scholar](#)
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 11(3), 863–877. [Google Scholar](#)
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. [Google Scholar](#)
- Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN), 1(1), 61–69. [Google Scholar](#)
- van't Hof, M., Tisseur, C., van Berckeleer-Onnes, I., van Nieuwenhuyzen, A., Daniels, A. M., Deen, M., Hoek, H. W., & Ester, W. A. (2021). Age at autism spectrum disorder diagnosis: A systematic review and meta-analysis from 2012 to 2019. *Autism*, 25(4), 862–873. [Google Scholar](#)
- Zulkanedi, B. (2021). Kemendagri Sorot Anggaran Belanja Pegawai di Sumsel Tinggi. <https://sumsel.inews.id/berita/kemendagri-sorot-anggaran-belanja-pegawai-di-sumsel-tinggi/2>

Copyright holder :

Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, M. Husni Mubarak (2022)

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

